

KAMPUNG PENDIDIKAN DAN UPAYA MENSUKSESKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Khusnan Iskandar,
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indoensia
E-mail: cak.kus.509@gmail.com

Saeful Anam
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indoensia
E-mail: shbt.saef@gmail.com

Abstract: This research article discusses the education village and the effort to make the 12- year study program successful in Lowayu Dukun Gresik. The participation of society in the development of the village community education is the main assets the development progress of the Indonesian state. Education will be able to advance with the support of all elements that are conceptualized in the center of education (schools, families and environment). This research is field research with a qualitative-phenomenological approach. The analysis process is carried out by means of data reduction, data display, and conclusion. The results of this study indicate that first, the foundation in developing educational villages in Lowayu Gresik is a juridical foundation (Pancasila, UUD 1945, PP No. 20 of 2003) philosophical foundation with reference to the flow of empiricism, the foundation of religion by making the Qur'an and al-hadith as the basis, then the psychological foundation and sociological foundation. Second, the construction of village education development application is done by involving the society as a major aspect for success, using the humanistic approach, and the pattern of community-based education as the design of the development of an educational village. Third, results of the development of this educational village can be proud of, because the awareness of children and parents and the community began to develop. In addition, the target for the success of the compulsory education program has been fulfilled where there are no school dropouts found in the village.

Keyword: Village, education

Pendahuluan

Kajian terhadap pendidikan tidak akan berakhir, hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan titik nadir kehidupan suatu bangsa. Dalam sebuah tulisan artikel yang termuat di salah satu media cetak nasional menyebutkan bahwa pendidikan diharapkan dapat memperkuat persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan tiap warga negara mengembangkan potensi diri.¹

Statement di atas merupakan motivasi besar bagi kehidupan pendidikan Indonesia, yang mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan negara kesatuan ini. Interaksi dari keduanya (pendidikan dan masyarakat), memberi peluang untuk kemajuan negara ini. Karena sering dinyatakan bahwa perkembangan suatu bangsa diprakarsai oleh nasib berkembangnya pendidikan. *“Bangsa yang memiliki pendidikan yang jelek ia tidak akan maju,* tutur presiden keenam Republik Indonesia.² Pendidikan sendiri akan bisa maju dengan adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali orang tua.³ Hal ini memunculkan suatu simpulan bahwa pendidikan menjadi posisi utama perubahan suatu negara.

Secara yuridis, Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar dan Pemberantasan Buta Aksara telah mulai digaungkan sejak 11 Tahun lalu dengan dibuktikan oleh intruksi presiden RI Nomor 5 tahun 2006. Gerakan tersebut ditindak-lanjuti dengan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap. Pendirian Sekolah Satu Atap dengan dimaksimalakan lokasi sekolah dasar yang sudah ada bertujuan untuk dapat menyelesaikan penuntasan permasalahan wajib belajar di lingkungan masyarakat. Akan tetapi kiat tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan mulus, hal ini dapat dilihat dari angka putus sekolah di wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 di tingkat SD, SMP dan SM berjumlah lebih dari 8.000 siswa yang putus sekolah.⁴ Dan jika dilihat dari wilayah Gresik sendiri jumlah siswa

¹ Lihat dalam Utomo Danajaya, *Reformasi Pendidikan* (Jakarta: KOMPAS, 2012).

² Winarno Surahmat, *Pendidikan Nasional Strategi Dan Tragedi* (Jakarta: KOMPAS, 2009). 121

³ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 21

⁴ Kemendikbud, “Ihtisar Data Pendidikan Tahun 2016 / 2017” (Jakarta, 2017). 47-48

putus sekolah kurang lebih ialah 400 siswa di seluruh jenjang sekolah⁵. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Gresik menyumbang lebih dari 0.5% anak putus sekolah di Jawa Timur, permasalahan klasik muncul karena faktor ekonomi, selain dari itu faktor perhatian orang tua sebagai lembaga pendidikan awal kurang begitu mendukung, sehingga banyak anak yang berhenti belajar (putus sekolah) disebabkan dua aspek tersebut.

Melihat data di atas, maka kita akan menemukan sebuah fenomena yang sangat ironis, jika dikaitkan dengan Kota Gresik sebagai Kota Beriman atau terkenal dengan sebutan kota santri.

Lembaga pendidikan khususnya pendidikan keluarga merupakan lingkungan awal terbentuknya karakter dan pola pertumbuhan anak, sehingga pendidikan keluarga menjadi penting untuk selalu dinomorsatukan. Selain dari itu, pendidikan (keluarga) memiliki posisi yang sangat strategis dalam memajukan bangsa, dari lingkup terkecil akan menularkan perubahan besar pada kemajuan negara.⁶ Dalam usaha mencapai pembangunan pendidikan, selain harus mensinergikan seluruh komponen pendidikan yang ada (pemerintah dan keluarga), juga dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam membangun lingkungan pendidikan yang selalu mendukung adanya proses pendidikan itu sendiri, dengan tujuan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kegiatan pendidikan di masyarakat.

Biar bagaimanapun antara pemerintah (*formal*), masyarakat (*non-formal*) dan keluarga (*in-formal*) tidak akan bisa dipisahkan. Keikutsertaan masyarakat adalah salah satu faktor penting dalam proses pembangunan pendidikan nasional.⁷ Untuk itu, menjadi suatu keniscayaan masyarakat dan keluarga pro-aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung terlaksananya pendidikan yang berkualitas.⁸ Ketiganya harus mampu meningkatkan kesadaran bersama bahwa pendidikan tidak akan maju tanpa adanya kesinergisan tri pusat pendidikan, memobilisasi masyarakat serta partisipasi bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

⁵ Lihat dalam Badan Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2016-2017

⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003* (Bandung: Fokus Media, 2009).

⁷ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*.

⁸ Tri pusat pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bisa menjadi landasan dasar bahwa untuk meraih tujuan pendidikan yang diharapkan Undang-undang harus melibatkan ketiga pusat pendidikan tersebut. *Ibid*.

Dalam era big data⁹ saat ini, dimana masyarakatnya semakin individualis, sehingga terjadi kesenjangan antara kebebasan (*freedom*) dengan kontrol diri (*self-control*) yang tidak berjalan seimbang. Banyak dalam kehidupan sehari-hari dijumpai anak dalam usia perkembangan menjadi tidak teratur dan liar. Mereka dengan asyiknya bermain *Play Station* (PS) dan *Game Online* yang melewati batas waktu hingga menyita jam belajar dan sekolah, serta kemerosotan moral anak (degradasi moral)¹⁰ menjadi penyebab putusnya niatan bersekolah dan belajar.

Fenomena tersebut seakan tidak mampu dikontrol oleh masyarakat, selain itu kurang partisipasi/ perhatian masyarakat menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karenanya masyarakat harus mampu membuat sistem serta inovasi dengan menciptakan lingkungan

⁹ Istilah *big data* merupakan perkembangan dari istilah globalisasi yang dulu sering dijumpai dalam beberapa tulisan, dalam Saeful Anam dinyatakan bahwa *big data* merupakan akumulasi sistem penyimpanan yang lambat-laun meluas dan berkembang yang dimonitori oleh aplikasi mesin pencarian di internet (*google*). Google dalam kerjanya mampu menyimpan ribuan hingga milyaran data dari penggunaannya, sehingga dari adanya penyimpanan dan pengaksesan data tersebut menjadi pemicu andilnya kases data yang cepat. Era *big data* telah menawarkan kemudahan dan beberapa keunggulannya seperti penagaksesan lebih cepat (*fast*), mudah (*easy*) dan menyenangkan (*happiness*), Anam, “Hoax Dan Fenomena Baru Generasi Digital,” *Al Fikrah* (Gresik, 2017). 56

¹⁰ Data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di tahun 2016 menyatakan bahwa lebih dari 22 % dari total 5.127 pengguna ialah kalangan pelajar yang masih aktif duduk di sekolah, capaian tersebut dipicu oleh konformitas pertemanan sebaya yang diawali dengan rasa penasaran dengan memulai merasakan narkoba dengan cara diberi atau dengan membayar paet hemat 20.000, al-hasil kebiasaan tersebut memberikan candu pada pelajar untuk ingin menikmati terus menerus, di sisi lain banyak diantara remaja yang menjadi kurir narkoba untuk diberikan kepada para pemesan. Baca dalam *Netralnews.com*, “BNN: 22 Persen Pengguna Narkoba adalah Para Pelajar dan Mahasiswa”, Rabu, 22 September 2016, diakses pada Rabu, 13 April 2017. Dan Contoh kongkrit budaya barat yang telah menjajah negeri ini ialah tayangan Televisi yang tidak mendidik anak, sehingga mereka banyak meniru aktifitas yang ditimbulkan. Dalam teori Albert Bandura dinamakan dengan Imitasi atau modelling yaitu pembelajaran dilakukan dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain baik perilaku tersebut sengaja diberi penguat ataupun tidak diberi penguat, eksperimen yang dilakukan oleh Bandura ini disebut juga dengan pembelajaran observasional. Lihat dalam Jhon. W Santrock, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), 287; Dalam buku lain Bandura dengan jelas menyatakan bahwa TV, Koran dan Film Layar merupakan model yang menyampaikan informasi, sehingga dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pengamatan tak langsung Matthew H. Olson B.R. Hergenhahn, *Theories Of Learning* (Jakarta: Kencana Media Group, 2009). 380-382.

pendidikan yang kondusif. Mereka harus mampu membuat kegiatan-kegiatan bernuansa pendidikan serta membuat desa menjadi peloor kampung pendidikan yang bisa menunjang kegiatan belajar anak di sekolah.

Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dalam rangka ikut bersama mencerdaskan anak bangsa, masyarakat Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mampu menghadirkan sebuah kawasan kampung berbasis pendidikan, Dengan memiliki formula pendidikan yang khas memungkinkan terbentuknya kampung yang berbasiskan pendidikan, baik pendidikan umum ataupun agama.

Melihat fenomena tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan pengkajian, pendalaman serta analisa terhadap Pengembangan Kampung Pendidikan sebagai Upaya Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui landasan yang digunakan oleh masyarakat dalam mengembangkan kampung pendidikan di Desa Lowayu Dukun Gresik, mendeskripsikan konstruksi kampung pendidikan di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagai upaya mensukseskan progam wajib belajar 12 Tahun dan mengetahui *out-put* yang dihasilkan dari pengembangan kampung pendidikan.

Istilah Kampung (Masyarakat) dan Pendidikan

Kata kampung mempunyai ragam arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kampung memilki beberapa pengertian antara lain:

- 1) Kelompok rumah yang merupakan bagian kota yang biasanya dihuni oleh orang-orang yang memilki penghasilan rendah.
- 2) Suatu desa atau dusun.
- 3) Kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah dan di awasi oleh kecamatan.
- 4) Keterbeakangan / belum modern.¹¹

Selanjutnya dalam beberapa literatur disebutkan bahwa kampung tidak bisa terlepas dari istilah hukum adat istiadat masyarakat setempat, hal ini dinyatakan dalam buku klasik pengantar sosiologi yang mengartikan bahwa kampuang ialah suatu masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat yang merupakan kesatuan

¹¹ <http://kbbi.co.id/arti-kata/kampung/>, diakses pada tanggal 10 April 2017.

kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan untuk berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya. kampung pendidikan sebagaimana judul penelitian ini, peneliti memberikan

Sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pendidikan mempunyai arti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹²

Jadi istilah kampung pendidikan adalah sebuah simbol yang menggambarkan sebuah tempat yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu tempat yang mana di dalamnya masyarakat melaksanakan kegiatan sehari-harinya bernuansa pendidikan, dalam mensukseskan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di sebuah wilayah tertentu.

Dalam perspektif Islam, yang disebut masyarakat yang baik ialah mereka yang selalu berdzikir, berfikir, dan dibarengi dengan amal sholeh. Hal ini menunjukkan masyarakat yang ideal menurut agama ialah masyarakat yang selalu menghiasi hari-harinyan dengan kegiatan belajar dan beramal shaleh dengan tujuan bersyukur kepada Allah.¹³

Hubungan Masyarakat (Manusia) dengan Pendidikan

Manusia adalah makhluk Tuhan YME, dalam perjalanan hidupnya manusia mempertanyakan tentang asal-usul alam semesta dan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Dua aliran filsafat yang

¹² Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003*.

¹³ Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya QS; Ali Imran ayat 190-191 dengan artian sebagai berikut;

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”. lihat dalam Kementerian Agama, *Al Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Kementerian Agama, 2009).96

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu Evolucionisme dan Kreasionisme (J.D. Butler, 1968).

Menurut Evolucionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia sebagaimana halnya alam semesta ada dengan sendirinya berkembang dari alam itu sendiri, tanpa Pencipta. Sebaliknya filsafat Kreasionisme menyatakan bahwa asal-usul manusia, sebagaimana halnya alam semesta adalah ciptaan suatu *Creative Causee* atau *Personality*, yaitu Tuhan YME.

Adapun secara filosofis penolakan dari filsafat Kreasionisme tersebut dapat didasarkan kepada empat argument berikut ini:

- a) Argumen ontologism; Semua manusia memiliki ide tentang Tuhan. Sementara itu, bahwa realitas (kenyataan) lebih sempurna daripada ide manusia. Sebab itu, Tuhan pasti ada dan realitas ada-Nya itu pasti lebih sempurna daripada ide manusia tentang Tuhan.
- b) Argumen Kosmologis, Segala sesuatu yang ada mesti mempunyai suatu sebab. Adanya alam semesta termasuk manusia adalah sebagai akibat. Di alam semesta terdapat rangkaian sebab akibat, namun tentunya mesit ada sebab Pertama yang tidak disebabkan oleh yang lainnya.
- c) Argumen Teleologis, Segala sesuatu memiliki tujuan (contoh : mata untuk melihat, kaki untuk berjalan dsb.). Sebab itu, segala sesuatu (realitas) tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh Pengatur tujuan tersebut, yaitu Tuhan.
- d) Argumen Moral : Manusia bermoral, ia dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang jahat, dsb. Ini menunjukkan adanya dasar, sumber dan tujuan moralitas. Dasar, sumber, dan tujuan moralitas itu adalah Tuhan.

Dengan demikian dapat Anda simpulkan bahwa manusia adalah individu/ pribadi, artinya manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, dan merupakan subjek yang otonom.

Hingga kini boleh dikatakan bahwa hubungan antara sekolah dengan masyarakat sangat minim, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan masih belum mendarah daging, mereka menganggap bahwa pendidikan hanyalah berlatarkan kelas dan ruang, sehingga mereka menitipkan anak ke sekolah formal tanpa ikut serta mengawasi perkembangan anak-

anaknyanya baik di sekolah, lingkungan masyarakat ataupun dalam keluarga kecilnya.

Secara akseptasi dalam pendidikan, masyarakat tidak melakukan pendidikan, hal ini didasari atas pengertian masyarakat yang sebenarnya.¹⁴ Itulah sebabnya masyarakat dalam undang-undang disebut dengan istilah pendidikan informal. Apa yang disebut pendidikan dalam masyarakat sejatinya ialah pengaruh masyarakat terhadap perkembangan anak “pendidikan”.¹⁵ Karena memang benar pengaruh paling besar terhadap pendidikan ialah masyarakat.

Pengaruh masyarakat dapat mendominasi dalam perjalanan pendidikan, baik pengaruh yang positif ataupun pengaruh yang negatif. Dalam Wahjoetomo disebutkan bahwa pengaruh positif masyarakat terhadap pendidikan ialah segala aktifitas masyarakat yang dapat mengarahkan kepribadian dan watak anak ke arah yang baik. Hal ini bisa dibuktikan dari adanya kegiatan kemasyarakatan berupa Remaja Masjid, Pramuka, Karang Taruna, forum diskusi dan lain-lain.¹⁶ Adapun pengaruh negatif masyarakat terhadap pendidikan ialah segala bentuk keadaan yang dapat merugikan pendidikan dan perkembangan anak, seperti film yang tidak mendidik dan lebih bertanyangkan kekerasan, majalah, dan pergaulan bebas.¹⁷

Dari itu, dalam kehidupan sosial, pendidikan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama. Dan setiap individu harus memiliki rasa memiliki dan bertanggungjawab atas tumbuhnya nilai-nilai kebaikan dalam suasana lingkungan dengan cara mencegah yang buruk dan

¹⁴ Masyarakat ialah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, lihat dalam <http://kbbi.co.id/artikata/masyarakat>, diakses pada tanggal 10 April 2017.

¹⁵ Hal ini seperti teori perkembangan “aliran empirisme” dalam kajian psikologi pendidikan, yang mana aliran tersebut memiliki konsep bahwa segala suatu perkembangan yang terjadi pada anak disebabkan dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2004). 108-109

¹⁶ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*. 42-43

¹⁷ *Ibid*, pengaruh negatif masyarakat terhadap pendidikan diakui sangat sulit untuk dibendung, hal ini bisa disebabkan karena dua hal. *Pertama*, pengaruh tersebut secara kuantitas sangat banyak dan mudah dijumpai, dan terlebih munculnya teknologi mempermudah pengaruh tersebut meluas, seperti tanyangan film porno (*blue Film*), Narkoba, minuman keras dan lain-lain. Kedua, pengaruh negatif tersebut memang menjajniken kenikmatannya oleh sebab itu kaum remaja yang telah terpengaruh oleh kenegatifan tersebut jika dilarang mereka akan mencari jalan lain untuk melampiaskan keinginannya.

mengajarkan yang baik. Sebagaimana penggalan ayat dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “dan bendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.¹⁸

Hingga pada dasarnya masyarakat dapat melangsungkan pendidikan secara mandiri, membentuk suatu komunitas yang diorientasikan pada pembentukan model dan pengelolaan pendidikan yang diharapkan “khas”. Dan saat ini, wujud pendidikan masyarakat seperti yang dimaksudkan di atas disebut sebagai pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*), dimana pendidikan secara praktiknya diorientasikan pada penekanan pemahaman akan kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan masalah oleh masyarakat dengan menggunakan potensi yang ada di lingkungannya.

Dengan demikian masyarakat memiliki peluang dan hak dalam membangun sistem pendidikan yang khas dengan kebutuhan lokal. Pendidikan berbasis masyarakat tersebut dapat dibentuk melalui jalur pendidikan formal maupun non formal sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator dalam turut membantu memberikan pertimbangan dan masukan bagi pelaksanaan program-program yang dikembangkan

Selain sebagai tanggung jawab bersama, untuk membangun sebuah komunitas peduli pendidikan atau kampung pendidikan, dibutuhkan penggerak sebagai pemacu semangat dalam memajukan pendidikan, hal ini sebagaimana hasil riset yang menyatakan bahwa peran seorang tokoh sebagai panutan di mata masyarakat sangat memberikan peluang besar terhadap penciptaan budaya dan kultur setempat. Strategi pendekatan kultur dan pendekatan toleransi yang digunakan kepada masyarakat diyakini sangat manjur dan ampuh untuk mengatur masyarakat.¹⁹ Sebuah tempat bisa dikatakan sebagai

¹⁸ Agama, *Al Quran Dan Terjemah*.

¹⁹ Ahmad Farid Utsman, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kampung Pendidikan Bervawasan Islami di Kawasan Wisata Pantai Bajul Mati Kabupaten Malang*

penggerak kampung pendidikan dapat dilihat dari kultur dan suasana sehari-hari.

Pentingnya peranan masyarakat dalam kemajuan pendidikan, diharapkan mampu memberikan nuansa edukatif yang lebih baik, karena semua pengetahuan dan pengalaman yang diterimanya (oleh anak) baik melalui penglihatan, pendengaran, ataupun tingkah laku yang berasal dari orang tua dan masyarakat akan mempengaruhi dan mewarnai terhadap pembentukan pribadi anak, maka setiap kata, sikap dan tingkah laku orang tua dan masyarakat merupakan cermin anak dan akan mewarnai kehidupannya.²⁰

Demikian pula dengan suksesnya kesadaran pendidikan pada setia orang tua ataupun masyarakat secara luas akan sangat berdampak bagi ketuntasan anak dalam mengenyam pendidikan yang diperuntukkan pada kehidupannya di masa yang akan datang. Dengan demikian untuk keberhasilan pendidikan harus didukung oleh suasana yang kondusif dari keluarga, lingkungan dan teman pergaulan anak.

Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat

(Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2002).

²⁰ Konsep ini sesuai dengan teori lingkungan dan keturunan yang banyak dijelaskan dalam beberapa literatur ilmu psikologi. Dua aliran yang dikonotasikan bertentangan konsep hal ini bisa diperdalam pada buku yang ditulis Ahmad Fauzi, *Psikologi umum*, (Bandung, Pustaka Setia, 1997), 107-108, dalam Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan; Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2009), 43, atau dalam Ngalm Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997), 14, pada setiap literature tersebut dinyatakan bahwasanya Nativisme yang dikembangkan oleh tokoh utamanya Arthur Schpenhauer (1788-1860) menyatakan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Berlawanan dengan aliran Nativisme terdapat aliran yang disebut dengan Empirisme yang diprakarsai utama oleh John lock yang menyatakan bahwa perkembangan pada manusia itu ditentukan oleh lingkungan semata, doktrin empirisme yang amat mashur dikenal ialah teori tabula rasa yang ibarat manusia lahir sebagai kertas kosong dan penentuan tulisannya tergantung pada pengalaman, lingkungan dan pendidikan yang dialami, pengamatan terhadap konsep tersebut secara sepintas seperti halnya dua sisi yang tidak bisa disatukan, akan tetapi kita bisa menganalisa bahwasanya kedua teori tersebut amatlah penting, dua teori tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, sehingga tidak heran jika dalam perkembangan keilmuan selanjutnya terdapat sebuah teori ketiga yang dikenal dengan *Teori Konvergensi* yang menyatakan bahwa kedua teori sebelumnya (nativisme dan empirisme) memiliki nilai penting yang sama terhadap perkembangan anak.

Dalam beberapa kasus, pendidikan berbasis masyarakat sering diidentikkan dengan pendidikan luar sekolah, semata hanya merupakan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), atau hanya dipandang sebagai alternatif model pendidikan yang dibutuhkan di saat krisis, pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya adalah sebuah substansi dari kegiatan pendidikan secara keseluruhan.

Pendidikan berbasis masyarakat lebih diarahkan untuk membentuk disposisi mental dan emosional, mensosialisasikan pemaknaan, dan mengajarkan peserta didik sebagai strategi dalam menyongsong masa depan. Pendidikan berbasis masyarakat tidak sekedar menuntut adanya keterlibatan dan peran aktif masyarakat, tetapi hasil dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dituntut untuk mampu memecahkan berbagai problema masyarakat.²¹

Tujuan pendidikan berbasis masyarakat adalah untuk mengembangkan kualitas pendidikan yang memberikan wewenang pada masing-masing masyarakat/sekolah. Negara tetap memiliki tanggung jawab yang utama terhadap pendidikan, tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang akan mempengaruhi kebijakan sekolah, khususnya dalam upaya pemberdayaan siswa.²²

Dengan membangun pendidikan berbasis masyarakat, diharapkan akan memberikan peluang bagi institusi pendidikan agar semakin meningkatkan peranannya, yakni dengan cara memberikan kemudahan kepada pimpinan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada di masyarakat, termasuk sumber daya manusia.²³ Dengan cara demikian, antara sekolah/madrasah dan masyarakat berada pada satu visi, misi, tujuan dalam ikut serta mensukseskan program pendidikan.²⁴

Pada tahun 1999 telah dimunculkan beberapa tujuan utama pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat, antar lain:

²¹ Bagong Suyanto, "Pendidikan Berbasis Masyarakat: Prasyarat Yang Dibutuhkan," *Edukasi* 1, no. 1 (2005). 11

²² Keter Petrus, "A Practitioner's Guide to School Community Based Management," *Department of Education, under the Regional Education Laboratory Program*, n.d., [www. Goole.com](http://www.Goole.com).

²³ Kamim Rusidi, "Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Dan Penerapannya Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005). 27

²⁴ Mujtahid, "Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat," n.d., www.waspada.co.id. 2

1. Membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pada semua tingkat, jenis, dan jalur pendidikan.
2. Merangsang terjadinya perubahan sikap dan persepsi tentang rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, rasa tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kekuatan multikultural.
3. Mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi.
4. Mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran persekolahan dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, penyediaan akses yang lebih besar, peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
5. Membantu mengatasi putus sekolah khususnya dari pendidikan dasar.²⁵

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat diharapkan dapat menghasilkan beberapa capaian. *Pertama*, membantu pemerintah dalam mengerahkan sumber daya lokal dan eksternal. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program pelatihan ketrampilan fungsional untuk anak putus sekolah. *Ketiga*, stimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat dalam hal rasa kepemilikan akan sekolah dan lembaga pendidikan lanjutan lainnya. *Keempat*, kebijakan desentralisasi pendidikan dengan upaya meningkatkan dukungan dari masyarakat. *Kelima*, dukungan terhadap masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan inovatif pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah.²⁶

Karakteristik Pendidikan Berbasis Masyarakat.

Konseptualisasi pendidikan berbasis masyarakat membawa banyak persepsi dan pemaknaan dari berbagai ahli pendidikan, sehingga belum ditemukan makna umum dari terminologi pendidikan berbasis masyarakat. Pada dasarnya pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia merujuk pada beberapa karakter, antara lain:

²⁵ Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001).

²⁶ *Ibid.* 24

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan.
2. Pengambilan keputusan yang berbasis sekolah/madrasah.
3. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta dan yayasan.
4. Pendidikan dan pelatihan oleh pusat pelatihan milik swasta.
5. Pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah.
6. Pusat kegiatan belajar masyarakat.
7. Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput (*grassroot organizations*) seperti LSM dan pesantren.²⁷

Kesemua karakteristik tersebut terkandung makna implisit tentang masyarakat, dimana istilah tersebut seringkali merujuk pada perbedaan dengan berbasis pemerintah.²⁸ Basis berarti derajat kepemilikan, dengan demikian pendidikan berbasis masyarakat berarti menunjuk pada kepemilikan penuh dari masyarakat untuk menentukan tujuan, pembiayaan, kurikulum, guru, standar ujian, serta ketentuan lainnya.

Hal penting lainnya ialah adanya peran masyarakat terhadap pengembangan konsep pendidikan berbasis masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui beberapa kriteria, antara lain:

1. Peran serta masyarakat tidak hanya berwujud pemberian bantuan uang atau fisik, tetapi juga hal-hal akademik.
2. Kewajiban sekolah (disertai *monitoring* dan *accountability*) yang tinggi terhadap pemerintah maupun masyarakat.
3. Memberi kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk partisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan.
4. Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan tujuan pendidikan, bukan hanya untuk kepentingan administrasi atau birokrasi.
5. Program pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik sekarang maupun mendatang, berorientasi pada peningkatan mutu bukan untuk kepentingan birokrasi.

²⁷ Dean Nielsen, *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Indonesia* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001).

²⁸ Rusidi, "Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Dan Penerapannya Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik." 32

6. Laporan pertanggungjawaban terbuka untuk seluruh pihak yang berkepentingan termasuk orang tua dan masyarakat.²⁹

Keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar dan sebatas pemberian biaya sekolah, namun sebaliknya peran aktif masyarakat dalam segala keputusan dan kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Peran aktif masyarakat dalam pendidikan merupakan realisasi dari otonomi daerah melalui pemerintah daerah untuk menjadikan masyarakat sebagai basis pendidikan sesuai dengan potensi daerahnya.

Masyarakat memiliki peran besar dalam ikut menciptakan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Peran tersebut antara lain menciptakan suasana yang menunjang pelaksanaan pendidikan, misalnya membantu pengadaaan biaya, tenaga kependidikan, maupun sarana prasarana.³⁰ Dengan demikian masyarakat dapat memberikan dukungan baik material, moral maupun kultural dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang lebih demokratis.

Partisipasi masyarakat dapat menjadi alat dan tujuan, tetapi dapat pula berarti keduanya, keterlibatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan upaya, memperbesar kapasitas atau memperluas hak dan kewajiban mereka. Ketika masyarakat terlibat, seharusnya mereka memberikan waktu, uang, gagasan, kepercayaan, dan kemauan, dan ketika harapan mereka meningkat maka upaya tindak lanjut perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat berkelanjutan.³¹ Partisipasi mengandung arti kesadaran untuk melakukan sebuah upaya secara bersama sesuai tujuan yang telah ditentukan bersama, sehingga ketika masyarakat turut berpartisipasi dalam program pendidikan maka mereka akan memiliki tanggung jawab untuk berusaha secara optimal mewujudkan suatu tujuan.

Pendidikan akan berjalan dengan baik, benar dan dinamis apabila hidup dalam masyarakat yang berbudaya akademik tinggi dan peduli dengan pendidikan. Masyarakat juga dapat menjadi media kontrol atas mutu pendidikan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, melalui penilaian oleh stakeholders: murid, orang

²⁹ AS Haris, "Pengembangan Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat: Sebuah Kajian Operasional Tingkat Sekolah" (Yogyakarta: Seminar Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2001).

³⁰ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).59

³¹ Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. 202

tua, tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, agamawan, industrialis, dan para pengguna jasa pendidikan terkait lainnya.³²

Program Wajib Belajar

Belajar merupakan kewajiban setiap manusia yang lahir di dunia ini. Dalam perspektif Islam sesuai dengan diktum nabi besar Muhammad SAW yang menyatakan kewajiban mutlak bagi umat Islam untuk belajar mulai dari buaian ibu hingga liang lahat. Lebih dari itu, belajar dalam kaitannya ini ialah pendidikan menjadi garapan utama suatu negara guna mencerdaskan bangsanya untuk bisa lebih maju di kanca dunia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.³³ Lebih lanjut dalam undang-undang dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.³⁴

Wajib belajar untuk pendidikan dasar dan menengah atau dikenal dengan istilah wajib belajar 12 tahun sudah dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Bahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 2 secara tegas telah mengamanatkan “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Selanjutnya, pada ayat 3 juga menegaskan “wajib belajar tersebut merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah,

³² Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21* (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003).

³³ Lihat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm 16

³⁴ *Ibid*, 16. Dalam kaitannya ini pemerintah telah menganggarkan 20 % dari APBN dan APBD untuk dialokasikan kepada pendidikan dalam beragam bentuk. Tercatat mulai tahun 2012 anggaran dana pendidikan telah eksis menjadi 20% dari APBN, dan pada tahun 2016 anggaran pendidikan mencapai Rp 419,2 triliun atau 20 persen dari total belanja negara Rp 2095,7 triliun. Dari total capaian tersebut, dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 49,2 triliun, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp 39,5 triliun, Kementerian Agama Rp 46,8 triliun, Kementerian Negara dan lembaga lainnya Rp 10,7 triliun, dan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa mendapat kurungan sebesar Rp 267,9 triliun serta anggaran pendidikan melalui pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 5 triliun. Sehingga total capaiannya semua ialah 419.2 triliun. Lihat dalam Direktorat Jenderal Anggaran, “*Informasi APBN 2017: APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, 2017), hlm 21.

pemerintah daerah, dan masyarakat”. Dengan demikian untuk mensukseskan pemerataan pendidikan oleh pemerintah harus didukung oleh beberapa elemen masyarakat khususnya kesadaran individu atau keluarga. Tujuan ini tidak lain ialah untuk memberikan peluang bagi setiap warga negara agar mampu menata kehidupannya yang lebih terhormat, baik dalam hal perekonomian, agama ataupun dalam hal bermasyarakat. Dari pembiayaan tersebut, undang-undang telah memberikan suatu rule yang jelas terhadap pemerintah baik pusat ataupun daerah yang memiliki kewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini sebagaimana tertera dalam pasal 11 ayat 1. Dari itu, konsekwensinya bagi pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib pula menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2).³⁵ Semua itu tidak akan pernah terjadi jika tidak diimbangi dengan pemberian informasi seluas-luasnya terhadap masyarakat untuk ikut andil dalam memberantas kebodohan dengan jalan mengikutsertakan anak dan keluarganya dalam pendidikan minimal 12 tahun.

Kesadaran dari setiap person menjadi penting, dan pemerintah harus mampu menjebatani timbulnya kesadaran kepada masyarakat dengan cara pendekatan yang terarah dan terbimbing. Penulis yakin masih banyak warga negara Indonesia yang belum bisa dan mampu mengenyam pendidikan hingga 12 tahun, terlebih pada masyarakat pedesaan yang jauh dari akses informasi. Oleh sebab itu apresiasi yang cukup membanggakan jika pemerintah telah memberikan layanan program Indonesia mengajar bagi pendidikan yang lulus dari perguruan tinggi dan mau meluangkan waktu mendidik di pelosok-pelosok negeri ini.

Meskipun wajib belajar sudah disuarakan sejak lama, namun penuntasannya masih belum tercapai. Banyak masalah yang timbul dalam pelaksanaan wajib belajar, terutama di daerah pedesaan dan daerah pegunungan/terpencil. Penyebab ketidaktuntasan wajib belajar dapat diidentifikasi atas beberapa hal diantaranya ialah (1) masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang lemah, (2) sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, (3) kurangnya sarana pendidikan, (4) rendahnya kualitas dan dedikasi guru, (5) letak geografis yang sulit dijangkau, (6) keterbatasan informasi, dan (7) persepsi masyarakat

³⁵ Lihat dalam Kementerian Pendidikan Nasional, *Sistem Pendidikan Nasional*, hlm 5

yang menganggap kurang pentingnya pendidikan bagi dirinya sendiri.³⁶ Tujuh hal ini menjadi penyebab utama khususnya poin terakhir yang menjadi alasan klasik permasalahan putusnya kesempatan sekolah bagi anak di Indonesia.

Program wajib belajar dapat dilalui melalui tiga tahapan manajemen, hal ini sebagaimana ulasan Hoy dan Miskel dalam Ulfatin yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.³⁷ Perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis yang terdiri atas penetapan jenis kegiatan, waktu, pelaksana, prosedur dan mekanisme kerja, kriteria keberhasilan, teknik, dan sarana kegiatan. Dalam melaksanakan tahap perencanaan ini, pemerintah ataupun masyarakat yang mengembangkan kampung pendidikan harus memandang pendidikan ke depan dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan memanfaatkan informasi dan data yang ada, pemerintah dan masyarakat dapat menetapkan tindakan konkrit antara lain: (1) merumuskan secara tegas dan jelas tujuan yang akan dicapai; (2) mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan tujuan rencana; (3) menganalisis dan mengklasifikasi data; (4) menjabarkan rencana-rencana secara spesifik dan operasional; (5) membuat pilihan-pilihan alternatif strategi pemecahan; (6) menyesuaikan rencana dengan situasi dan kondisi; (7) menetapkan urutan prioritas dalam merealisasikan setiap rencana; dan (8) menetapkan tindakan spesifik tentang teknik/metode, waktu, kriteria, pelaksana, dan hal-hal lain terkait dengan masalah teknis pelaksanaan kegiatan.

Kedua pelaksanaan. Pada tahapan ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah ataupun masyarakat dapat memerankan diri sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan semua unsur atau sumber yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Semisal unsur manusia, dimana pemerintah memerintahkan kepala dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat untuk senantiasa proaktif dalam pelaksanaan program. Sedangkan unsur non-manusia antara lain sarana, prasarana, dana, dan kebijakan. Keberadaan kedua kelompok unsur ini dalam pelaksanaan satuan organisasi pendidikan (sekolah) ataupun komunitas masyarakat saling

³⁶ Nurul Ulfatin, Amat Mukhadis, Ali Imron, Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif Penuntasannya, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 17, Nomor 1, Februari 2010, hlm. 36-45

³⁷ *Ibid*, 37

berhubungan dan berinteraksi, baik dalam merealisasikan tugas pada tingkat teknis yaitu pembelajaran di kelas maupun pada tingkat manajerial kebijakan pendidikan di wilayahnya.

Tahapan akhir dari kegiatan manajemen adalah evaluasi. Pada tahapan ini, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan pengukuran dan penilaian atas hasil dan pencapaian target yang direncanakan (kampung pendidikan). Penilaian yang kontinyu dan berkelanjutan sangat penting untuk ditekankan, karena selama ini evaluasi seringkali belum dianggap sebagai kesatuan kegiatan yang penting dalam manajemen oleh para praktisi di lapangan. Perlu untuk selalu diingat bahwa kesuksesan program wajib belajar bagi warga negara di Indonesia tidak akan pernah tercapai tanpa adanya keikutsertaan para stakeholder dalam membimbing masyarakat agar tumbuh kesadaran dari masing-masing person.

Prinsip-prinsip dilaksanakannya Pendidikan

Secara garis besar prinsip dilaksanakannya pendidikan ialah prinsip antropologis keharusan dan kemungkinan pendidikan bagi manusia dalam kehidupan. Prinsip ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang perlu dididik dan mendidik diri, hal ini dinyatakan dalam sebuah buku Studi Islam (*Islamic Studies*) bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah dan penuh tantangan³⁸, sehingga menjadi sebuah keharusan manusia mengenyam pendidikan. Dan secara idealis manusia diturunkan sebagai makhluk yang sempurna (*insan al kamil*), sehingga cita-cita harus terwujud dan atau perlu untuk diwujudkan melalui berbagai upaya yang diusahakan, seperti memodifikasi ruang untuk dapat dijadikan sebagai medium pelaksanaan pendidikan dengan baik dan sesuai harapan.

Adapun secara potensialitas, manusia memiliki potensi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, dan potensi untuk dapat berbuat baik³⁹. Namun setelah kelahirannya, bahwa berbagai potensi tersebut mungkin terwujudkan, bahkan mungkin kurang terwujudkan, sehingga dalam hal ini manusia perlu untuk dididik menjadi lebih baik.

Kemungkinan manusia dapat dididik ini diberlakukan atas empat hal, yaitu; 1) potensialitas dan dinamika kehidupan yang dapat diartikan sebagai tujuan riil pendidikan bagi manusia, yaitu menjadi manusia yang ideal (*insan al-kami*), (2) individualitas, yaitu upaya

³⁸ Abudinata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 68

³⁹ *Ibid.*

pendidik memfasilitasi manusia (peserta didik) untuk dapat diarahkan menjadi dirinya sendiri (menjadi seseorang/pribadi). Di pihak lain, manusia (peserta didik) adalah individu yang memiliki kediri-sendirian (subjektifitas), bebas dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri, sebab itu, individualitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik (3) sosialitas, dimaksudkan bahwa proses keberlangsungan manusia dalam kehidupan ialah bergantung pada pergaulan antar sesama, dan ia membutuhkan hubungan imbal balik antar keduanya, dan (4) moralitas, dalam kaitannya ini pendidikan dilaksanakan dengan sistem norma dan nilai tertentu.

Landasan atau Asas dilaksanakannya Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan secara nyata memiliki landasan yang kuat baik itu dalam segi Yuridis, Filosofis, Sosiologis, Psikologis, ataupun landasan agama. Oleh karena itu perlu kiranya pendidikan menjadi prihal wajib bagi seluruh manusia yang hidup di dunia ini. menjadi sebuah keniscayaan kemajuan suatu peradaban ini Diwali dari meningkatnya kualitas pendidikan itu sendiri.

Asas yuridis,⁴⁰ yaitu suatu landasan yang ditetapkan melalui hukum pemerintahan baik dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan tentang pendidikan (UU Sisdiknas) ataupun peraturan menteri dan serta peraturan daerah. Sebagai dasar terselenggaranya pendidikan. Dalam salah satu konten undang-undang tersebut ialah UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dinyatakan bahwa “setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” (pasal 6), dan “Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar” (pasal 34) statmen ini menjadi dasar bahwa pelaksanaan pendidikan menjadi suatu keiscayaan.

Asas filosofis, landasan ini terkait langsung dengan falsafah bangsa sebagai landasan utama negara khususnya pada butir Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dimana dalam butir tersebut mengharuskan pemerintah mampu memberikan pengayoman terhadap seluruh rakyat dengan memberikan kesempatan yang sama pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan kesejahteraan yang merata serta mampu hidup dengan

⁴⁰ Adanya asas yuridis ini menunjukkan bahwa segala ketentuan dalam pelaksanaan pendidikan dicantumkan dalam sebuah ketentuan hukum negara,

saing tolong menolong⁴¹. Selain falsafah negara sebagaimana di atas, dalam teori filsafat Jhone lock “tabularasa” dinyatakan bahwa manusia merupakan mahluk yang dilahirkan seperti kertas kosong dan ia akan mampu menuliskan dengan tinta di atasnya dengan pengalaman yang dimilikinya dalam kehidupan. Dengan merujuk kepada pemikiran Muhammad Zaini mengenai aliran filsafat dapat diperinci diantaranya ialah: paranielisme, idealisme, realisme, pragmatism, eksistensialisme, progresivisme.⁴²

Asas psikologis, secara psikologis manusia dalam kehidupan akan mengalami dua fase yaitu fase perkembangan dan pertumbuhan. Untuk mengatur dua fase tersebut manusia memerlukan tahapan belajar, dimana belajar menjadi titik central untuk menumbuh-kembangkan minat yang dimiliki oleh setiap manusia.⁴³ Landasan psikologis yang berkaitan dengan perkembangan harus menyesuaikan dengan masa –masa perkembangan anak meliputi masa bayi hingga masa pendewasaan, dan landasan yang berkaitan dengan cara belajar dibangun atas hubungan stimulus dan respon (S-R) yang kemudian akan mengetahui beberapa hal diantaranya faktor penghambat, kemauan belajar peserta didik, peroses belajar mengajar, dan tingkat-tingkat perkembangan peserta didik.⁴⁴

Asas sosiologis, asas ini berhubungan dengan transformasi kebudayaan, proses sosialisasi individu dan rekontruksi masyarakat, dengan demikian pendidikan adalah proses pelestarian dan

⁴¹ Yudhi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2012). 600

⁴² Pendefinisian atas aliran-aliran filsafat di atas ialah 1) filsafat paranielisme ialah filsafat yang menekankan terhadap kemampuan intelektual melalui pengetahuan yang abadi atau absolut, 2) idealisme merupakan aliran yang bersifat mutlak yang kebenarannya berasal dari tuhan sehingga implimentasinya kepada penekanan keagamaan dan bertindak tegas terhadap pelanggaran, 3) reanisme adalah aliaran yang menonjolkan suatu pengamatan yang dilakukan secara ilmiah, 4) pragmatism adalah aliran yang menekankan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah yang dihadapi, 5) eksistensialisme merupakan aliran yang mengajarkan bahwa individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna, dan 6) progresivisme adalah aliran yang penekanannya pada pentingnya melayani perbedaan individu, maka dalam aplikasinya siswa belajar aktif Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi Dan Inovasi* (Yogyakarta: Sukses Office, 2009). 23-58

⁴³ Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran; Teori Dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Santuan Pendidikan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008). 48

⁴⁴ *Ibid.* 55

peningkatan budaya, harkat dan martabat manusia. Karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya.⁴⁵ Selain itu, menurut diktum nabi Muhammad SAW “anak terlahir dalam keadaan fitrah⁴⁶” sehingga dalam hal ini suatu keadaan kebaikan bawaan dan lingkungan sosial itulah yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Menjadikan manusia dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat dan lingkungan.

Landasan Historis, dalam konteks landasan historis ini dilihat dari perjalanan sejarah para tokoh Indonesia yang dengan integrasi tinggi memperjuangkan pendidikan untuk dapat diikuti oleh seuruh masyarakat Indonesia, mereka adalah para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini, Muhammad Syafi’i, Ki Hajar Dewantara ataupun tokoh besar pendiri organisasi tua di Indonesia yaitu KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Ahmad Dahlan.

Mohamad Syafei misalnya, ia telah mendirikan Sekolah Indonesia Netherlands School, Kayutanan di Sumatra Barat (1926) yang memiliki konsep mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas dasar usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka karena sekolah Hindia Belanda hanya menyiapkan anak-anak menjadi pegawai mereka saja. Ataupun Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta (1922) melahirkan falsafah “*Ing Ngaso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani?*” yang artinya ‘*ing ngarso sung tuladha*’ = ketika di depan publik, seorang guru harus bisa memberikan contoh / teladan yang baik kepada orang lain terutama peserta didik. ‘*Ing madya mangun karsa*’ = ketika di tengah atau di antar publik, guru harus ‘*mangun karsa*’ bekerja keras (membangun kinerja yang terbaik). ‘*Tut Wuri Handayani*’ = ketika di belakang, seorang guru harus memberi semangat dan motivasi, support, atau dorongan.⁴⁷

Sejak Kebangkitan Nasional (1908) sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik melalui jalur politik praktis, jalur ekonomi, social budaya, dan khususnya melalui jalur pendidikan. Sifat perjuangan bangsa kita saat itu tidak lagi hanya menitik beratkan pada perjuangan fisik. Mengingat

⁴⁵ Asep Herry Hernawan, *Materi Pokok Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010). 14-17

⁴⁶ Mustofa Ahmad, *Jawahirul Bukhori* (Surabaya: Al Hidayah, 1850).

⁴⁷ Dedy Kuswandi, “Pengejawantahan Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara Di Lingkungan Ibu Pawaiyatan Tamansiswa Yogyakarta” (Malang, 2005).

ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Kolonial Belanda yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka, maka kaum pergerakan semakin menyadari bahwa pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan ke dalam program perjuangannya.

Asas Religi, dalam konteks agama, pendidikan menjadi pembahasan utama yang harus dimiliki oleh manusia, hal ini dapat dilihat dari QS. Al'alaq sebagai surat yang pertama kali turun. Dalam surah tersebut sangat jelas bahwa potensi akal manusia akan memberikan banyak perubahan dengan jalan membaca dan menelaah apapun yang menjadi prihal penting yang ada disekitarnya. Pembahasan lain dalam asas keagamaan ini ialah Manusia diciptaan dengan bentuk yang semourna dan berbeda dengan makhluk lain, hal ini menunjukkan potensi dasar manusia terhadap tiga komponen "jasmani, rohani dan akal." Ketiganya komponen tersebut akhirnya akan kembali kepada Sang Khaliq untuk mempertanggungjawabkan kinerja dari ketiga komponen tersebut. Manusia diutus ke dunia sebagai khalifah. Agar manusia mampu menjadi khalifah yang baik, maka manusia memerlukan pendidikan.⁴⁸

Lowayu sebagai Kampung Pendidikan di Wilayah Gresik.

Lowayu merupakan kawasan pedesaan yang berada di kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Secara geografis desa ini sangat diuntungkan karena potensi alamnya sangat bagus, yaitu pertanian, dan juga perairan (aliran Bengawan Solo). Sejak adanya pemikiran kampung pendidikan oleh komunitas sosial peduli pendidikan di wilayah Gresik, Lowayu menjadi sasaran desa yang akan

⁴⁸ Landasan ini dapat dibuka dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 30, ang menerangkan bahwa manusia diutus di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Redaksi ayatnya ialah;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"*

dijadikan pengembangan kampung pendidikan setelah 3 desa sebelumnya, yaitu Sidokumpul, Sidomulyo dan Sidayu. Pada tahun 2014 gagasan kampung pendidikan mulai masuk di desa Lowayu Dukun Gresik ini, dimana para Dewan Pendidikan termasuk Ahmad Nur Faqih memberikan arahan sosialisasi kepada Kepala Desa dan beberapa warga untuk diminta proaktifnya menjadikan Lowayu sebagai desa yang peduli kepada pendidikan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara, pada tahun 2015 kampung pendidikan di Lowayu telah dimasukkan dalam PERDES (Peraturan Desa), penyusunan Perdes tersebut didampingi oleh Dewan Pendidikan dan Dewan Permusyawaratan Desa (DPD). Dan pada tahun yang sama pula rilis secara ujicoba kampung pendidikan di Desa Lowayu Dukun Gresik, dan terbukti 3 bulan setelah uji coba evaluasi yang didapatkan menunjukkan bahwa masyarakat respon dan mendukung atas terciptanya lingkungan pendidikan di Desa Lowayu. Dan pada tahun 2016 awal lowayu secara resmi dijadikan sebagai Kampung Pendidikan oleh Bupati Gresik.

Landasan Pengembangan Kampung Pendidikan di Desa Lowayu Gresik

Secara konseptual dinyatakan bahwa pendidikan secara implementasinya memiliki landasan-landasan yang kuat untuk diberikan kepada manusia secara luas, guna agar manusia dalam peradabannya mampu memberikan tindakan perubahan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. diantara landasan-landasan yang digunakan ialah landasan yuridis, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis ataupun landasan religi (keagamaan).

Menindaklanjuti landasan yang dibangun oleh Desa Lowayu sebagai desa yang mengembangkan kampung berwawasan pendidikan di atas, dapat dijabarkan bahwa ada kesesuaian yang tepat atas pelaksanaan pengembangan kampung pendidikan, hal ini bisa peneliti korelasikan dengan kajian konseptual yang ada, diantaranya ialah;

a. Landasan yuridis

Pada landasan yuridis dapat ditemukan tentang konsep pelaksanaan pendidikan di desa, serta kebijakan pengembangan pendidikan desa, yaitu dalam beberapa kajian hukum diantaranya bisa ditemukan dalam:

- 1) Pancasila, sebagai dasar negara dan filsafah hidup bangsa Indonesia khususnya pada Sila terakhir yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini berarti

semua masyarakat dan semua penduduk di Indonesia mendapatkan payung hukum terhadap haknya mengakses pendidikan.

- 2) Undang-undang Dasar 1945, hal ini mengacu pada statement dalam teks penutup undang-undang yang berbunyi “*memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”, dan terdapat pada pasal 31 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, hal ini menunjukkan keleluasaan masyarakat untuk bisa mengikuti pendidikan yang diselenggarakan.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kaitannya ini bisa dirincikan terhadap beberapa pasal, diantaranya ialah; 1) Pasal 3 (fungsi dan tujuan), 2) Pasal 4 (prinsip penyelenggaraan pendidikan) ayat 2, 3) Pasal 26 (pendidikan non formal), dan 4) Pasal 36 (kurikulum).
- 4) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hal ini mengacu pada pasal 93 (ayat 1) yang menyatakan Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP. (ayat 2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus, (ayat 3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Dari landasan-landasan di atas, menunjukkan bahwa adanya landasan secara hukum (yuridis) yang terselenggara dalam pengembangan kampung pendidikan di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Amanah serta tugas yang dimiliki oleh masyarakat untuk bersama-sama memajukan dan ikut serta mencerdaskan bangsa membuktikan bahwa pendidikan non formal telah mampu menghantarkan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

b. Landasan filosofis

Hasil data penelitian menunjukkan adanya landasan filosofis yang digunakan oleh desa untuk mengembangkan kampung berwawasan pendidikan, dan secara pengklasifikasian aliran termasuk mengikuti aliran filsafat Jhon Locks “*tabularasa*” yang menyatakan bahwa perkembangan seorang individu

ditentukan oleh pengaruh luar “masyarakat” untuk ikut serta menciptakan pengalaman-pengalaman baru yang diperoleh selama hidup, manusia diibaratkan sebagai lembar kertas kosong yang dapat ditulis apapun sehingga menjadi bermakna.

c. Landasan Kegamaan

Landasan keagamaan ini disandarkan pada landasan pada kitab suci Al-Qur’an yang merupakan sumber hukum Islam yang harus dinomorsatukan sebagai konsep terselenggaranya hidup yang damai, tidak berhenti dalam satu makna itu saja melainkan adanya Al-Qur’an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memberikan rahmat terhadap semua makhluk (rahmatan li al-‘alamin), hingga praktek yang bersifat ukhrawi maupun duniawi semuanya telah disinggung dalam Al-Qur’an, termasuk konsep dasar pendidikan itu sendiri.

Jika kita telaah secara mendalam dalam Al-Qur’an sendiri ada banyak ayat yang menerangkan tentang pentingnya pendidikan, baik ayat yang menganjurkan kepada manusia untuk selalu dalam majlis ilmu, ataupun ayat yang berkenaan dengan pentingnya potensi akal untuk selalu dikembangkan, serta beberapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya orang berilmu.

d. Landasan psikologis

Suatu penilaian atau pandangan atas perkembangan anak didasari oleh perubahan yang dialami anak dalam menanggapi permasalahan di sekitarnya, bagaimana mereka bisa memulai dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sebaik mungkin, tidak berfokus hanya pada pola perkembangan anak secara rohaniah semata akan tetapi secara batinah juga dalam pengontrolan holistik dan kontinuitas, di sisi lain pola belajar anak juga merupakan kajian dari psikologi yang penting kaitannya untuk dicermati lebih dalam.

Pengembangan Desa Berwawasan Pendidikan didesa Lowayu sendiri dalam landasan psikologis dapat digolongkan atas pemberian dua batasan yaitu *pertama* batasan yang bertolak ukur atas psikologi perkembangan anak, *kedua* batasan yang bertolak ukur pada psikologi belajar anak. Hal ini sesuai dengan kajian konseptual yang telah lalu.

Pada batasan pertama menunjukkan tentang pentingnya perkembangan anak untuk selalu diawasi dan dikontrol guna membimbing anak untuk dapat menuju capaian yang positif.

Kemudian pada psikologi belajar anak pengembang desa pendidikan ini mengharapakan tumbuhnya rasa kesadaran diri pada setiap individu akan pentingnya pendidikan, tujuannya tidak lain sebagai pondasi terbentuk peradaban yang kokoh dan berdaya saing tinggi.

e. Landasan Sosiologis

Secara kultur sosial pengembangan desa pendidikan ini berasaskan atas beberapa asas yaitu kebersamaan, keragaman, berkeadilan, kemandirian, kesetaraan dan keterbukaan, sehingga desa selalu menanamkan hidup damai, rukun dan saling memiliki. Asas-asas tersebut secara langsung memberikan nilai pada masyarakat untuk senantiasa terlibat dalam mensukseskan pendidikan di desa, yakni mereka saling membantu dan saling memberi semangat antara satu dengan yang lain, tidak terkecuali jika menemukan salah satu masyarakat yang kesusahan.

Konstruksi Kampung Pendidikan di Desa Lowayu Gresik Sebagai Upaya Mensukseskan Wajib Belajar

Konstruksi pengembangan kampung pendidikan yang bisa dikembangkan oleh masyarakat untuk kemajuan pendidikan meliputi, keterlibatan masyarakat, pendekatan yang digunakan oleh desa serta sistem pendidikan yang dikembangkan. Semua itu harus dilaksanakan dengan kesesuaian tujuan pendidikan yang ada.

Disebutkan dalam kajian konseptual bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan pendidikan adalah sebuah keniscayaan, sehingga hal tersebut telah terdapat kesesuaian yang sangat signifikan antara kajian konseptual dengan hasil penemuan penelitian di lapangan, hal ini menjadikan indikator bahwa pengembangan kampung pendidikan di Desa Lowayu sangatlah patut untuk mendapatkan apresiasi dari semua kalangan untuk selalu dicontoh dan dikembangkan lebih maju.

Selain keterlibatan masyarakat dalam mensukseskan program, yang harus mempunyai relevansi dengan komponen yang lain, bangunan kampung pendidikan juga dikembangkan atas pendekatan yang dipakai, karena dengan adanya pendekatan ini memberikan ruang kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memajukan desa dengan memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Pendekatan humanistik merupakan pendekatan yang cukup memberikan gambaran jelas bahwa masyarakat dan anak-anak desa belajar atas kemauan dan kemauannya dan kesadarannya masing-masing, maka tepat jika

pendekatan humanistik digunakan oleh desa untuk mengembangkan kampung berwawasan pendidikan.

Selanjutnya dari serangkaian komponen dan pendekatan tersebut, sistem pendidikan merupakan hal yang cukup penting untuk diketahui, karena merupakan langkah menuju suksesnya program yang diberlakukan. Dengan mengacu pada hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya ditemukan bahwa sistem pendidikan yang digunakan dalam pengembangan kampung pendidikan ialah pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) yang memberi ruang utama pada masyarakat untuk ikut andil mengembangkan dan menyukseskan pendidikan di desa, ciri utama dari pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) ini ialah konsep pendidikan yang mencakup dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini sebagaimana temuan peneliti di lapangan ialah ditemukannya keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan serta evaluasi program pendidikan yang dikembangkan di desa.

Hasil Pengembangan Kampung Pendidikan di Desa Lowayu Gresik

Sudah menjadi sebuah ketentuan jika suatu proses dijalankan akan memberikan suatu hasil dari proses tersebut, semua itu akan berjalan dan berkembang pada setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain daripada itu keberhasilan usaha atau pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kondisi dan aktivitas yang dilakukannya. Oleh karena itu setelah mengetahui dari adanya landasan pengembangan kampung berwawasan pendidikan serta konstruksinya, maka dapat dilihat dari hasil pengembangan programnya, dimana hasil yang dapat dicapai dalam jangka pendek ialah munculnya kesadaran individu “orang tua” untuk mengantarkan anaknya dalam meraih prestasi dengan belajar. hal ini bisa ditelisik terhadap kesadaran anak dalam menjalankan aktifitas belajarnya, mereka dengan sangat antusias menjalankan aktifitas belajar sebagai kebutuhan utamanya.

Dengan menempatkan manusia “anak” sebagai subjek pembelajaran secara langsung akan memberikan dimensi kemanusiaan yang bisa trampil, tampil serta teraktualisasi secara utuh ke permukaan. Dengan demikian harapan “mensejahterakan manusia” akan bisa terrealisasikan lewat praktek-praktek pendidikan secara langsung dan berbasis masalah serta lebih manusiawi.

Catatan Akhir

Kehadiran Desa Lowayu sebagai kampung bernuansa pendidikan dipandang perlu untuk diapresiasi karena masyarakat merupakan aspek penting terselenggaranya pendidikan. Menjadi pusat pendidikan sebagaimana ungkapan Ki hajar Dewantara yang dimiliki konsep tri pusat pendidikan yang salah satunya ialah pendidikan masyarakat itu sendiri. Selain dari itu, budaya masyarakat sangat mampu memberikan pengaruh besar terhadap terciptanya perkembangan anak sehingga hal ini menjadi suatu keunikan yang harus dikembangkan.

Daftar Rujukan

- Abudinata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Agama, Kementerian. *Al Quran Dan Terjemah*. Jakarta: Kementerian Agama, 2009.
- Ahmad, Mustofa. *Jawahirul Bukhori*. Surabaya: Al Hidayah, 1850.
- Anam. "Hoax Dan Fenomena Baru Generasi Digital." *Al Fikrah*. Gresik, 2017.
- Badan Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2016-2017
- B.R. Hergenhahn, Matthew H. Olson. *Theories Of Learning*. Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Danajaya, Utomo. *Reformasi Pendidikan*. Jakarta: KOMPAS, 2012.
- Direktorat Jendral Anggaran. "*Informasi APBN 2017: APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global*". Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran. 2017.
- Fauzi, Ahmad. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- <http://kbbi.co.id/arti-kata/kampung/>, diakses pada tanggal 10 April 2017.
- <http://kbbi.co.id/arti-kata/masyarakat>, diakses pada tanggal 10 April 2017.
- Haris, AS. "Pengembangan Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat: Sebuah Kajian Operasional Tingkat Sekolah." Yogyakarta: Seminar Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2001.

- Hernawan, Asep Herry. *Materi Pokok Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Jalal, Fasli. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Kemendikbud. "Ihtisar Data Pendidikan Tahun 2016 / 2017." Jakarta, 2017.
- Kementrian Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003*. Bandung: Fokus Media, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- KJ, Veeger. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Kuswandi, Dedy. "Pengejawantahan Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara Di Lingkungan Ibu Pawaiyatan Tamansiswa Yogyakarta." Malang, 2005.
- Latif, Yudhi. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003.
- Mujtahid. "Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat," n.d. www.waspada.co.id.
- Netralnews.com, "BNN: 22 Persen Pengguna Narkoba adalah Para Pelajar dan Mahasiswa", Rabu 22 September 2016, diakses pada Rabu, 13 April 2017
- Netralnews.com, "BNN: 22 Persen Pengguna Narkoba adalah Para Pelajar dan Mahasiswa", Rabu, 22 September 2016, diakses pada Rabu, 13 April 2017.
- Nielsen, Dean. *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Indonesia*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Petrus, Keter. "A Practitioner's Guide to School Community Based Management." *Department of Education, under the Regional Education*

- Laboratory Program*, n.d. www. Goole.com.
- Purwanto, Ngalm. *Psikologi Pendidikan*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997),
- Rusidi, Kamim. “Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Dan Penerapannya Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.” IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum Dan Pembelajaran; Teori Dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Santuan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Santrock, Jhon. W. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Shadily, Hassan. *Sosiologi untuk Masyarakat Desa*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1993
- Surahmat, Winarno. *Pendidikan Nasional Strategi Dan Tragedi*. Jakarta: KOMPAS, 2009.
- Suyanto, Bagong. “Pendidikan Berbasis Masyarakat: Prasyarat Yang Dibutuhkan.” *Edukasi* 1, no. 1 (2005).
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan; Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2009),
- Ulfatin, Nurul. Amat Mukhadis. Ali Imron. Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif Penuntasannya. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 17. Nomor 01. Februari 2010
- Utsman, Ahmad Farid. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kampung Pendidikan Berwawasan Islami di Kawasan Wisata Pantai Bajul Mati Kabupaten Malang. *Skripsi*. Malang: Maulana Malik Ibrahim Malang. 2002.
- Wahjoetomo. *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Wibowo, Agus. Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Keterlaksanaan Pendidikan di Sekolah Daerah Terpencil (Studi Multisitus pada SDN Panikel 02 dan SDN Ujunggagak 03, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap). *Tesis*. Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang .2015.

Khusnan Iskandar dan Saeful Anam

Wisadirana, Darsono. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: UMM Press. 2005.

Zaini, Muhammad. *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi Dan Inovasi*. Yogyakarta: Sukses Office, 2009.